

Atri Waldi, SPd, MPd
Dra. Reinita, MPd
Yesi Anita, SPd, MPd
Katherine Putri Rivelia, SPd.
Aisyah Anggraeni, SPd.



KONSEP DASAR PKN SID



KONSEP DASAR PKN SD

Atri Walqi, S.Pd.,M.Pd
Dra. Reinita.,M.Pd
Yesi Anita, S.Pd.,M.Pd
Katherine Putri Rivelia, S.Pd.
Aisyah Anggraeni, S.Pd.



TAHTA
MEDIA GROUP

TAHTA MEDIA GROUP

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nonce dan tanggal permohonan	: EC002023191732, 11 Oktober 2023
Pencipta	
Nama	: Atri Walidi, S.Pd., M.Pd., Dra. Reinita, M.Pd dkk.
Alamat	: Jln. Gunung Juro No.16, Kelurahan Suras Godang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat, 25146
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Atri Walidi, S.Pd., M.Pd., Dra. Reinita, M.Pd dkk.
Alamat	: Jln. Gunung Juro No.16, Kelurahan Suras Godang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat, 25146
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Buku
Judul Ciptaan	: KONSEP DASAR PKN SD
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 11 Oktober 2023, di Padang
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya
Nonce pencatatan	: 000524687

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Atri Waldi, S.Pd.,M.Pd	Jln. Gunung Juaro No.16, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang
2	Dra. Reinita, M.Pd	Jln. Teknologi V No.B20, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang
3	Yesi Anita, S.Pd.,M.Pd	Jl. Mangga IX No 488, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang
4	Katherine Putri Rivelia, S.Pd.	Jl. Parak Anau Saiyo No. 12, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang
5	Aisyah Anggraeni, S.Pd.	Perumahan Mega Mulia Blok D2 No 17, Jalan Rimbo Tarok, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Atri Waldi, S.Pd.,M.Pd	Jln. Gunung Juaro No.16, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang
2	Dra. Reinita, M.Pd	Jln. Teknologi V No.B20, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang
3	Yesi Anita, S.Pd.,M.Pd	Jl. Mangga IX No 488, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang
4	Katherine Putri Rivelia, S.Pd.	Jl. Parak Anau Saiyo No. 12, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang
5	Aisyah Anggraeni, S.Pd.	Perumahan Mega Mulia Blok D2 No 17, Jalan Rimbo Tarok, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang



KONSEP DASAR PKN SD

Penulis:

Atri Waldi, S.Pd.,M.Pd
Dra. Reinita.,M.Pd
Yesi Anita, S.Pd.,M.Pd
Katherine Putri Rivelia, S.Pd.
Aisyah Anggraeni, S.Pd.

Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
Tahta Media

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
ix,127, Uk: 17,6 x 25 cm

ISBN: 978-623-147-174-1

Cetakan Pertama:
Oktober 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

PRAKATA

Buku dengan judul “KONSEP DASAR PKN SD” ini disusun untuk membantu mahasiswa memahami konsep-konsep dasar dalam studi Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar, yang memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk warga negara yang aktif, peduli, dan bertanggung jawab di Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata kuliah yang sangat relevan dan vital dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Melalui mata kuliah ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek yang berkaitan dengan negara, masyarakat, dan kewarganegaraan. Dalam perjalanan ini, mahasiswa akan diajak untuk memahami sejarah, sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta peran individu dalam pembangunan bangsa.

Buku ini dirancang agar mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran mahasiswa. Setiap bab disusun dengan cermat, dan konsep-konsep dasar disajikan secara sistematis dan terstruktur. Kami percaya bahwa buku ini akan menjadi panduan yang berguna dalam proses pembelajaran Anda.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para pengajar dan praktisi Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan masukan berharga dalam penyusunan buku ini. Kami juga berterima kasih kepada Saudara, mahasiswa, yang telah berkomitmen untuk memahami dan mendalaminya. Semoga buku ini dapat membantu Saudara mencapai pemahaman yang lebih baik tentang konsep dasar Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah dasar dan menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademis dan kehidupan sehari-hari Saudara.

Semoga buku ini memberikan manfaat yang besar bagi pembelajaran Saudara mahasiswa.

Hormat kami,

[Penulis]

DAFTAR ISI

PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PARADIGMA BARU PEMBELAJARAN PKN ABAD 21.....	1
A. Pengertian Paradigma Baru Pkn Sd.....	2
B. Karakteristik Warga Negara Yang Demokratis.....	2
C. Pembelajaran Pkn Untuk Pengembangan WargaNegara Yang Demokratis	5
D. Tujuan Dari Paradigma Baru Pembelajaran Pkn.....	6
BAB 2 WARGA NEGARA DEMOKRATIS	7
A. Pengertian Warga Negara yang Demokratis	8
B. Upaya Mewujudkan Warga Negara yang Demokratis	9
C. Sistem Tata Kehidupan Berbangsa	10
D. Pembelajaran PKN Mewujudkan Warga Negara yang Demokratis	11
Rangkuman	11
Studi Kasus.....	13
Referensi	14
BAB 3 HAKIKAT INDIVIDU WARGA NEGARA SEBAGAI MAKHLUK TUHAN YANG MAHA ESA.....	15
A. Pengertian Individu Warga Negara Sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa..	16
B. Dasar Hukum Sebagai Makhluk Tuhan Yaitu Peraturan Kehidupan Beragam di Indonesia	18
Rangkuman	20
Studi Kasus.....	20
Referensi	22
BAB 4 HAKIKAT INDIVIDU SEBAGAI MAKHLUK SOSIAL	23
A. Pengertian Individu Sebagai Makhluk Sosial.....	24
B. Nilai- Nilai yang Terdapat dalam Kehidupan Bermasyarakat.....	25
C. Ciri-Ciri Manusia Sebagai Makhluk Sosial.....	25
D. Kondisi Kemajemukan Masyarakat Serta Norma Yang Berlaku Dalam Masyarakat	26
Rangkuman	27
Studi Kasus.....	28
Referensi	29
BAB 5 HAKIKAT INDIVIDU SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA ...	30
A. Pengertian Negara atau Individu Sebagai Masyarakat	31
B. Unsur-unsur Terjadinya Negara	32
C. Hak dan kewajiban warga Negara Indonesia	35
D. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Berdasarkan Pasal UUD 1945..	39
E. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia bersarkan pasal AmandemenUUD 1945	41
F. Atribut Yang Harus Dimilki oleh Warga Indonesia	43
G. Karakteristik yang harus dimiliki oleh WNI pada abad 20.....	44

Rangkuman	46
Studi Kasus.....	47
Referensi	49
BAB 6 SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA DALAM MENGHADAPI PENJAJAHAN.....	50
A. Ciri-Ciri Strategi Perjuangan Bangsa Indonesia Pada Abad XX.....	51
B. Perjuangan Bangsa Indonesia Sebelum Abad XX	51
C. Perjuangan Bangsa Indonesia Sesudah Abad XX	56
Rangkuman	58
Studi Kasus.....	59
Referensi	61
BAB 7 SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA DALAM RANGKA MENGISI KEMERDEKAAN	62
A. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia di Berbagai Daerah	63
B. Perjuangan Fisik dan Diplomasi dalam Mempertahankan Kemerdekaan Perjuangan fisik	64
Rangkuman	66
Studi Kasus.....	66
Referensi	68
BAB 8 KEBERAGAMAN SOSIAL BUDAYA	69
A. Pengertian Sosial Budaya.....	70
B. Jenis-jenis keberagaman.....	72
C. Konflik Pada keberagaman Sosial Budaya.....	76
D. Contoh Konflik Akibat Keberagaman di Indonesia	77
E. Tipe-tipe Kelompok Sosial Budaya	79
F. Tujuan Sosial Budaya.....	79
Rangkuman	80
Studi Kasus.....	80
BAB 9 KEBANGGAAN SEBAGAI BANGSA INDONESIA	83
A. Kebanggaan sebagai Bangsa Indonesia dan Memiliki Bangsa Indonesia dan Faktor-Faktor Terbantuknya Bangsa Indonesia	84
B. Faktor-Faktor yang Memperkuat Bangsa Indonesia.....	85
C. Keunggulan yang dimiliki Bangsa Indonesia	86
Rangkuman	88
Studi Kasus.....	89
Referensi	90
BAB 10 HAKIKAT PANCASILA	91
A. Pengertian Pancasila.....	92
B. Fungsi Pancasila.....	93
C. Tujuan Pancasila	95
Rangkuman	95
Studi Kasus.....	95
Referensi	97

BAB 11 HAKIKAT, SIFAT, FUNGSI DAN KEDUDUKAN UUD 1945.....	98
A. Pengertian, Sikap, Fungsi UUD 1945	99
B. Batang Tubuh Dan BAB UUD 1945.....	102
C. Prinsip yang Terkandung dalam Batang Tubuh UUD 1945	102
D. Isi Batang Tubuh UUD 1945.....	103
Rangkuman	104
Studi Kasus.....	105
Referensi	106
BAB 12 HAKIKAT AMANDEMEN UUD 1945	107
A. Pengertian dari Amandemen dan UUD 1945.....	108
B. Tujuan Diadakannya Amandemen	109
C. Manfaat Diadakannya Amandemen	110
D. Latar Belakang Amandemen UUD 1945	110
E. Dasar Pemikiran untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945.....	112
F. Perubahan atau Amandemen UUD 1945	113
G. Melaksanakan Aturan-aturan Setelah (Pasca) Amandemen dengan Tanggung Jawab.....	114
Rangkuman	115
Studi Kasus.....	116
Referensi	118
DAFTAR PUSTAKA.....	119
GLOSARIUM	124
INDEKS.....	125
PROFIL PENULIS	126

BAB 1
PARADIGMA BARU
PEMBELAJARAN PKN
ABAD 21

A. PENGERTIAN PARADIGMA BARU PKN SD

Paradigma merupakan sebuah kerangka berpikir yang digunakan dalam proses pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pkn dengan paradigma baru mensyaratkan materi pembelajaran yang memuat komponen-komponen pengetahuan, ketrampilan, dan disposisi kepribadian warga negara yang fungsional bukan hanya dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan juga dalam masyarakat di era global. Paradigma baru dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di SD merujuk pada cara berpikir baru tentang PKN yang mendasar, seperti materi pokok keilmuan, visi dan misi, serta model atau kerangka berpikir yang digunakan dalam proses pendidikan kewarganegaraan di Indonesia (Ulfah, 2018)

Sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditandai oleh semakin terbukanya persaingan antarbangsa yang semakin ketat, maka bangsa Indonesia mulai memasuki era reformasi di berbagai bidang menuju kehidupan masyarakat yang lebih demokratis. Dalam masa transisi atau proses perjalanan bangsa menuju masyarakat madani (civil society), pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran dipersekolahan perlu menyesuaikan diri sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang sedang berubah.

Tugas PKN dengan paradigma barunya mengembangkan pendidikan demokrasi mengemban tiga fungsi pokok, yakni mengembangkan kecerdasan warga negara (civic intelligence), membina tanggung jawab warga negara (civic participation). Kecerdasan warganegara yang dikembangkan untuk membentuk warga negara yang baik bukan hanya dalam dimensi rasional melainkan juga dalam dimensi spiritual, emosional dan sosial sehingga paradigma baru PKN bercirikan multidimensional.

B. KARAKTERISTIK WARGA NEGARA YANG DEMOKRATIS

Kebutuhan akan adanya paradigma baru PKN saat ini sudah endesak bangsa Indonesiayang saat ini telah mengalami suatu perubahan diharapkan bergerak ke arah pendewasaan hingga terbentuknya masyarakat yang betul-betul demokratis, religius, beradab, bersatu, dan berkeadilan sosial sesuai dengan konsep nilai, norma dan moralitas yang tersurat dan tersirat dalam Pancasila dan UUD 1945.

Namun demikian pengembangan masyarakat yang demokratis, religius, beradab, bersatu, dan berkeadilan sosial tidaklah mudah, terutama bagi masyarakat Indonesia yang secara historis belum memiliki pengalaman utuh berkehidupan yang betul-betul demokratis, perkembangan ekonomi yang masih terbatas, identitas rasional yang masih rapuh, dan budayakewarganegaraan yang belum terbentuk.

Oleh karena itu, pembangunan masyarakat Indonesia demokratis yang religius, beradab,bersatu, dan berkeadilan sosial itu perlu waktu, upaya gigih yang konsisten dan komitmen kebangsaan, serta pendidikan demokrasi yang sinambung. Perlu digaris bawahi bahwa masyarakat tidak dapat hidup berdemokrasi dengan baik apabila mereka dalam keadaan tidak berpendidikan, bodoh, apatis, dan miskin. Masyarakat demokrasi hanya dapat tercipta apabila masyarakatnya berpendidikan memadai dan secara ekonomis kebutuhan dasar hidupnya sudah terpenuhi. Dengan demikian masyarakat demokratis yang religius, beradab, bersatu dan berkeadilan sosial baru dapat terwujud apabila masyarakat terdidik baik dan sejahtera, shg mereka mau dan mampu

berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara etimologi, demokrasi berasal dari kata dalam bahasa latin demos yang berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Shg demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dijalankan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan). Setelah adanya proses pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sering disebut “luber dan jurdil”. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi sesungguhnya bukan hanya seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat prak tek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku shg demokrasi sering disebut suatu pelebagaan dari kebebasan.

Rusmin (2022) mengemukakan bahwa untuk mengkonsepsikan kembali pendidikan kewarganegaraan dengan paradigmanya yang baru, konsep negara dapat didekati dari sudut pandang sistem. Dalam masyarakat demokrasi terdapat lima sistem tata kehidupan bernegara sebagai berikut :

- a. Sistem personal adalah suatu sistem yang merujuk pada orang-orang yang menjadi subyek dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, yang terdiri atas pemerintah dan yang diperintah.
- b. Sistem kelembagaan menunjuk kepada lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan menurut konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Sistem normatif adalah sistem hukum dan perundang-undangan yang mengatur tata hubungan negara dan warga negara.
- d. Sistem kewilayahan menunjuk kepada seluruh wilayah teritorial yang termasuk ke dalam yuridiksi negara Indonesia.
- e. Sistem ideologis menunjuk kepada ide-ide dasar penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tinjauan sistem ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang eksistensi kehidupan bernegara. Kehidupan bernegara secara sehat merupakan fungsi dari seluruh komponen sistemnya. Dengan kata lain, kerusakan dalam salahsatu komponen sistem akan mengganggu berfungsinya sistem kenegaraan secara keseluruhan.

Dengan memperhatikan atribut-atribut kewarganegaraan diatas, dan struktur pengorganisasian yang berorientasi pada sistem kehidupan bernegara maka PKn dengan paradigma baru mensyaratkan materi pembelajaran yang memuat komponen-komponen pengetahuan, keterampilan, dan disposisi kepribadian warga negara yang fungsional bukan hanya dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan juga dalam masyarakat di era globalisasi.

Kewarganegaraan dalam demokrasi konstitusional berarti bahwa setiap warga negara (1) merupakan anggota penuh dan sederajat dari sebuah masyarakat yang berpemerintahan sendiri dan (2) diberi hak-hak dasar dan dibebani tanggung jawab. Warga negara hendaknya mengertibahwa dengan keterlibatannnya dalam kehidupan politik dan dalam masyarakat demokratis, mereka dapat membantu meningkatkan

kualitas hidup di lingk tetangga, masyarakat, dan bangsa.

Bidang studi pkn merupakan suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan sekolah dan diterima sebagai wahana utama dalam esensi pendidikan demokrasi di Indonesia. Dalam paradigma baru bidang studi PKN terdapat beberapa karakteristik, sebagaimana dijelaskan Kurniawan (2018) sebagai berikut:

- a. Civic intellegency, yaitu kecerdasan dan daya nalar warga negara yang baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, maupun sosial.
- b. Civic responsibility, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negarayang bertanggung jawab.
- c. Civic participation, yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggungjawabnya, baik secara individual, sosial, maupun sebagai pemimpin hari depan.

Karakteristik-karakteristik tersebut diwujudkan dalam tiga kelompok kompetensi dalam bidang studi pkn, yaitu:

- a. Kompetensi untuk menguasai pengetahuan kewarganegaraan;
 - Memahami tujuan pemerintah dan prinsip-prinsip dasar konstitusi pemerintah republik Indonesia.
 - Mengetahui struktur, fungsi dan tugas pemerintah daerah dan nasional serta bagaimana keterlibatan warga negara membentuk kebijaksanaan publik.
 - Mengetahui hubungan negara dan bangsa Indonesia dengan negara-negara dan bangsa-bangsa lain beserta masalah-masalah dunia dan atau internasional.
- b. Kompetensi untuk menguasai keterampilan kewarganegaraan;
 - Mengambil atau menetapkan keputusan yang tepat melalui proses pemecahan masalah dan inkuiri.
 - Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan suatu isu tertentu.
 - Menentukan atau mengambil sikap guna mencapai suatu posisi tertentu.
 - Membela atau mempertahankan posisi bagi mengemukakan argumen yang kritis, logis dan rasional.
 - Memaparkan suatu informasi yang penting pada khalayak umum.
 - Membangun koalisi, kompromi, negosiasi, dan consensus (demokrasi).
- c. Kompetensi untuk menguasai karakter kewarganegaraan;
 - Memberdayakan dirinya sebagai warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi secara efektif dan efisien dalam berbagai aktivitas masyarakat, politik, dan pemerintahan pada semua tingkat (daerah dan nasional).
 - Memahami bagaimana warga negara melaksanakan peranan, hak, dan tanggung jawab personal untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat pada semua tingkatan (daerah dan nasional).
 - Memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai budi pekerti, demokrasi, hak asasi manusia dan nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kehidupan.

C. PEMBELAJARAN PKN UNTUK PENGEMBANGAN WARGANEGARA YANG DEMOKRATIS

Untuk mengembangkan masyarakat yang demokratis melalui pendidikan kewarganegaraan diperlukan suatu strategi dan pendekatan pembelajaran khusus yang sesuai dengan paradigma baru pkn. Keunggulan dari paradigma baru pkn dengan model pembelajaran yang memfokuskan pada kegiatan belajar siswa aktif (active students learning) dan pendekatan inkuiri (inquiry approach). Azis dkk (2022) menjelaskan model pembelajaran PKN dengan paradigma baru memiliki karakteristik:

- 1) Membelajarkan dan melatih siswa berpikir kritis
- 2) Membawa siswa mengenal, memilih dan memecahkan masalah
- 3) Melatih siswa dalam berpikir sesuai dengan metode ilmiah
- 4) Melatih siswa untuk berpikir dengan ketrampilan sosial lain yang sejalan dengan pendekatan inkuiri.

Dengan adanya paradigma baru dalam pembelajaran PKn ini, maka muncullah suatu proses pembelajaran baru. Karena masalah utama dalam pembelajaran pkn ialah penggunaan metode pembelajaran yang terkesan kaku, kurang flkesibel, kurang demokratis, dan cenderung lebih dominan one way method. Guru pkn mengajar lebih banyak mengejar target yang berorientasi pada nilai ujian akhir, disamping masih menggunakan model konvensional yang monoton, aktivitas guru lebih dominan daripada siswa, akibatnya guru seringkali mengabaikan proses pembinaan tatanan nilai, sikap, dan tindakan. Sehingga, untuk mencapai tujuan PKn dengan paradigma baru perlu disusun materi dan model pembelajaran yang sejalan dengan tuntutan dan harapan PKn, yakni mengembangkan kecerdasan warga negara dalam dimensi spiritual, rasional, emosional dan sosial, mengembangkkn tanggung jawab warga negara, serta mengembangkan peserta didik berpartisipasi sebagai warga negara guna menopang tumbuh dan berkembangnya warga negara yang baik.

Dari pemaparan diatas dapat dikemukakan bahwa paradigma baru PKn merupakan paradigma demokrasi yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah yang bersifat multidimensional atau berisi jamak. Bila ditampilkan dalam wujud program pendidikan, paradigma baru ini menuntut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memberikan perhatian yang cermat dan usaha yang sungguh-sungguh pada pengembangan pengertian tentang hakikat dan karakteristik aneka ragam demokrasi, bukan hanya yang berkembang di Indonesia.
- 2) Mengembangkan kurikulum dan pembelajaran yang sengaja dirancang untuk memfasilitasi siswa agar mampu mengeksplorasi bagaimana cita-cita demokrasi telah diterjemahkan kedalam kelembagaan dan praktek diberbagai belahan bumi dan dalam berbagai kurun waktu.

Tersedianya sumber belajar yang dapat memfasilitasi siswa untuk memahami penerapan demokrasi di negara lain sehingga mereka memiliki wawasan yang luas tentang ragam ide dan sistem demokrasi dalam berbagai konteks

Pembelajaran PKn selayaknya dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektivitas dalam berpartisipasi. Maka untuk mengatasi masalah

tersebut dari paradigma baru itu muncul suatu model pembelajaran yang efektif dan efisien sebagai alternatif pendekatan, yaitu model pembelajaran berbasis portofolio (portfolio based learning) atau Proyek Belajar Kewarganegaraan Kami Bangsa Indonesia (PKKBI). Portofolio adalah suatu kumpulan pekerjaan siswa dengan maksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut panduan-panduan yang ditentukan. Portofolio dalam pembelajaran PKn merupakan kumpulan informasi yang tersusun dengan baik yang menggambarkan rencana kelas siswa berkenaan dengan suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji mereka, baik dalam kelompok kecil maupun kelas secara keseluruhan. Hal-hal yang telah dipelajari siswa berkenaan dengan suatu masalah yang mereka pilih. Pembelajaran PKn yang berbasis portofolio memperkenalkan kepada para siswa dan mendidik mereka dengan beberapa metode dan langkah-langkah yang digunakan dalam proses politik.

Pembelajaran ini bertujuan untuk membina komitmen aktif peserta didik terhadap kewarganegaraannya dan pemerintahannya, serta mendidik para siswa agar mampu untuk menganalisis berbagai dimensi kebijakan publik dan dengan kapasitasnya sebagai warganegara muda, mencoba memberi masukan terhadap kebijakan publik di lingkungannya, sehingga hasil yang diharapkan adalah kualitas warga negara yang “cerdas, kreatif, partisipatif, prospektif, dan bertanggung jawab.

Strategi instruksional yang digunakan dalam model ini, pada dasarnya bertolak dari strategi “Inquiry learning, Discovery learning, Problem solving learning, Research oriented learning” yang dikemas dalam model “Project” ala John Dewey. Dalam hal ini diterapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi masalah yang akan dikaji
- 2) Mengumpulkan dan menilai informasi dari berbagai sumber berkenaan dengan masalah yang dikaji
- 3) Mengkaji pemecahan masalah
- 4) Membuat kebijakan public
- 5) Membuat rencana Tindakan

D. TUJUAN DARI PARADIGMA BARU PEMBELAJARAN PKN

Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Oleh karena itu perlu mengenal sejumlah dimensi PKN untuk mempermudah mengkaji dan menganalisis tujuan. Berikut ini dimensi PKN:

- PKN sebagai program kulikuler;
- PKN sebagai program akademik;
- PKN sebagai program social kultural.

Adapun tujuan dari paradigma baru pembelajaran PKn hendaklah dapat mengakomodasi/membantu untuk mencapai tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Pembelajaran PKn dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan ketrampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektivitas dalam berpartisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto, M. P. (2022). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Radar Kampus.
- Anom, I. G. N. (2015). Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia. *Jurnal Advokasi*, 5(2), 293-303.
- Ariyanto, A. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Penegakan Kode Etik Oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).
- Arvinal, R. (2023). *Mekanisme Ibukota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS JAMBI).
- Asshiddiqie, Jimly. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Azis, F., dkk. (2022). Pendampingan Penguatan Model Pembelajaran Paradigma Baru Bagi Guru-Guru Sekolah Muhammadiyah Di Kecamatan Bontonompo Selatan. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 1(5), 52-56.
- Azmi, S. (2016). Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pengejawantahan dimensi manusia sebagai makhluk individu, sosial, susila, dan makhluk religi. *Likhitaprajna*, 18(1), 77-86.
- Buntoro, K. (2021). *Lintas Navigasi Di Nusantara Indonesia-Rajawali Pers*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Bu'ulolo, Y. (2021). Membangun Budaya Literasi di Sekolah. *Jurnal Bahasa Indonesia Prima (JBIP)*, 3(1), 16-23.
- Choiriyah, N. R. A. (2023). *Peranan Guru PAI Sebagai Pembimbing Dalam Meningkatkan Karakter Religius Pada Anggota Ekstrakurikuler Majelis Taklim Di SMAN 1 Pace Nganjuk* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Devy, D. A. (2020). *Hidup Bermasyarakat*. Alprin.
- Dewi, S., & Utama, A. S. (2019). Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru Dan Era Reformasi. *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, 13(2), 17-36.
- Drastawan, I. N. A. (2021). Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 928-939.
- Efritadewi, A., & Jefrizal, W. (2017). Peneggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Selat*, 4(2), 260-272.
- Eleanora, F. N. (2012). Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(1), 141-165.
- Elsyarani, S. (2023). *Analisis Nilai Sosial Dalam Budaya Ngamping Pada Masyarakat Melayu Di Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas* (Doctoral dissertation, IKIP PGRI PONTIANAK).
- Ervani, E., Sumiyatun, S., & Kuswono, K. (2019). Politik Diplomasi Perdana Menteri Amir Syarifudin Dan Perjanjian Renville. *SwarnaDwipa*, 3(1).
- Fadhilah, I. A., & Maunah, B. (2021). Manusia sebagai Makhluk yang Perlu dan Dapat Dididik. *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 15(2), 254-268.

- Fadilah, N. (2019). Tantangan dan Penguatan Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *Journal of Digital Education, Communication, and Arts (DECA)*, 2(02), 66-78.
- Firdiana, P. (2020). *Term Al-Untha< Dalam Al-Qur'an Wawasan Tentang Peran dan Status Wanita dalam Kehidupan Manusia* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Giri, I. P. A. A., & Girinata, I. M. (2021). Tat Twam Asi: Transformasi Individualistis Kearah Solidaritas Sosial. *Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya*, 5(1), 93-100.
- Hantono, D., & Pramitasari, D. (2018). Aspek perilaku manusia sebagai makhluk individu dan sosial pada ruang terbuka publik. *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 5(2), 85-93.
- Hasmi, N. (2022). *Cerpen "Korupsi" Karya Mihar Harahap Terhadap Pendekatan Mimetik Siswa Sma/Smk* (Doctoral dissertation, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Hidayah, Z. (2015). *Ensiklopedi suku bangsa di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hidayatika, R. F. (2023). Penerapan Metode Role Playing untuk Meningkatkan Pemahaman Materi Upaya Bangsa Indonesia dalam Mempertahankan Kedaulatannya pada Siswa Kelas V.
- Hudha, Nurul, dkk. (2020). *Best Score Tes CPNS (Modul dan Bank Soal Terlengkap 2021)*. Solo: Genta Smart.
- Hutasoit, W. L. (2018). Analisa Perubahan Amandemen UUD 1945 Perubahan Pertama Tahun 1999 Sampai Perubahan Ke-Empat Tahun 2002. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 37(2), 66-82.
- Ichsan, M., Maulia, S. T., & Hendra, H. (2023). BUDI UTOMO: PEMANTIK PERGERAKAN NASIONAL. *Jurnal EduSosial*, 3(1), 96-106.
- Indrijati, S., Usman, E., Sri Endah, K., & Anggaunitakiranantika, A. (2016). Modul pelatihan guru mata pelajaran antropologi sma kelompok kompetensi d (problematika kebudayaan, model-model pembelajaran dan media pembelajaran).
- Iryana, W. (2022). *Sejarah pergerakan nasional: melacak akar historis perjuangan bangsa Indonesia dan kiprah kaum santri dalam lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia*. Prenada Media.
- Isnaini, A. (2014). Kekerasan atas nama agama. *Kalam*, 8(2), 213-228.
- Jufrizal, J. (2018). Pro dan Kontra dalam Proses Pengesahan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh Tahun 2013-2033. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 3(3).
- Juliantara, T. (2021). Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi Masyumi Menanggapi Perjanjian Roem-Royen Tahun 1949. *INTELEKSIA-Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 2(2), 373-392.
- Kaelan. (2000). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR XVII /MPR/1998. TENTANG HAK ASASI MANUSIA. Jakarta 13 November 1998.
- Khotimah, K. (2017). Interaksi Sosial Masyarakat Islam Dan Kristen Di Dusun Iv Tarab Mulia Kecamatan Tambang Kabupaen Kampar. *Kutubkhanah*, 19(2), 239-249.

- Krishna, I. B. W. (2021). Sura Magadha: Patriotisme Dan Nasionalisme Warga Banjar Dalam Perang Banjar Tahun 1868. *Pramana: Jurnal Hasil Penelitian*, 1(1), 21-31.
- Kurniawan, M.I. (2018). *Buku Ajar Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar*. Sidoarjo: Umsida Press.
- Laila, I., & Anshori, I. (2022). Implementasi Metode Pembelajaran Mind Mapping dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS tentang Manusia sebagai Makhluk Sosial di MI Marhatillah Matabe. *ISLAMIKA*, 4(1), 89-107.
- Liliwari, Alo. 2003. *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Lintang, F. L. F., & Najicha, F. U. (2022). Nilai-nilai sila persatuan Indonesia dalam keberagaman kebudayaan Indonesia. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 79-85.
- Madiong, B. dkk. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education*. Makasar: Celebes Media Perkasa.
- Mahmudah, H., Suhariyanto, D., Fajrina, R. M., Marwenny, E., Husnita, L., Nazmi, R., ... & Citra, H. (2023). *PENGANTAR KEWARGANEGARAAN: Membentuk Warga Negara Yang Berkualitas*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Max, B. S. (2019). *Mengenal Indonesia: Aku Cinta Indonesia, Tak Kenal Maka Tak Sayang*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Mintarsih, F.R. (2023) *Sejarah Indonesia : untuk SMK Kelas X Semester Ganjil*. Lombok : Penerbit P4I.
- Miriam Budiardjo. (1981). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Mochlisin. (2007). *Kewarganegaraan*. Jakarta: Interplus.
- Mumazziq, R. (2017). Surabaya: Kota Pahlawan Santri.
- Muslih dan Ulfah R.A. (2019). Urgensi Karakteristik Warga Negara Demokratis pada Abad ke Dua Puluh Satu. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7 (2), 125-139.
- Nugrahanto, W., & Adyawardhina, R. (2018). DEMOKRASI DALAM SEJARAH MILITER INDONESIA; Kajian Histois Tentang Pemilihan Panglima Tentara Pertama Tahun 1945. *Sosiohumaniora*, 20(1), 78-85.
- Nurdadi, D. N., Anmawar, J. N., & Sudiatmi, T. (2023). Nilai Moral Dalam Cerpen Yang Bertahan Dan Binasa Perlahan Karya Oky Mandasari Sebagai Bahan Pembelajaran Sastra Di Sma Kelas XI. *Jurnal Bastra (Bahasa dan Sastra)*, 8(3), 409-415.
- Octaviona, E., Zaki, A., & Putri, G. L. (2020). Memahami Nilai-Nilai Pancasila Melalui Budaya Literasi. *Jurnal El-Pustaka*, 1(2).
- Pahmi, R. (2023). *Solidaritas Komunitas Punk Kota Palopo* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).
- Pambudi, W. (2018). Sakralisasi Pembukaan UUD 1945. *ISTORIA Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*, 14(1).
- Permadi, O. S. (2017). Pemanfaatan Cahaya Alami Siang Hari Pada Bangunan Farabale Citylight Rusunami. *Repository Tugas Akhir Prodi Arsitektur Itenas*, (1).
- Permana, E. P. (2021). *Konsep Dasar Ilmu Sosial Sekolah Dasar 1*.

- Prakoso, Ardhamo, dkk. (2020). *Pendidikan Pancasila (Pendekatan Berbasisi Nilai-Nilai)*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Prasetyo, M. J. (2023). Pemberlakuan Prinsip Kedaulatan Wilayah Menurut Hukum Internasional Sebagai Unsur Berdirinya Negara. *Lex Administratum*, 11(1).
- Pratiwi, H. A. (2023). Pemikiran Dan Perjuangan Tiga Serangkai (Pendiri Indische Partij) Untuk Membangkitkan Rasa Nasionalisme Terhadap Peserta Didik. *Lani: Jurnal Kajian Ilmu Sejarah dan Budaya*, 4(1), 12-26.
- Puput Fajar, S. (2012). *PERJUANGAN INDONESIA MELAWAN JEPANG DALAM PERTEMPURAN LIMA Hari DI SEMARANG (15-19 OKTOBER 1945)* (Doctoral dissertation, UNSADA).
- Putra, D.K.S. (2019). *Political Social Responbility Dinamika Komunikasi Politik Dialogis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahayu, S.A. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ramadhan, R. H. N. (2018). *Transformasi Nilai Pancasila Melalui Organisasi Mahasiswa Guna Meningkatkan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara (Studi Deskriptif HIMA PKNH FKIP Universitas Pasundan Bandung)* (Doctoral Dissertation, FKIP Unpas).
- Rindjin, K. (2013). *Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rini, N. M., Pratiwi, I. A., & Ahsin, M. N. (2021). Dampak penggunaan gadget terhadap perilaku sosial anak usia sekolah dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7(3), 1236-1241.
- Rohmah, N. (2020). *Psikologi Agama*. Jakad Media Publishing.
- Rusmin, L. (2022). *Konsep Dasar Ppkn SD*. Solok: CV. Mitra Cendekia Media.
- Septiana, E. (2017). Usaha Tan Malaka dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1946-1948.
- Seran, E.Y. dan Mardawani. (2021). *Konsep Dasar IPS*. Yogyakarta : Deepublish.
- Setiadi, Elly M. (2008). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Setiawati, Y., & Samsudin, S. (2020). Gerakan Politik Sarekat Islam di Jawa Tahun 1916-1921. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 4(2), 355-372.
- Setyaningrum, N. D. (2018). Budaya Lokal Di Era Global. *Ekspresi Seni Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni*, Vol.20 , No 2, November 2018, 103. Retrieved Juli 17, 2021, from <https://journal.isi-padangpanjang.ac.id/index.php/Ekspresi>
- Sinaga, S. S. (2023). Kedudukan Dan Peran Dewan Perwakilan Daerah (Dpd) Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo. Persada.
- Sooai, I. P., & Qisty, S. N. (2021). Sistem Religi dan Kepercayaan Jingitui di Kabupaten Sabu Raijua. *Tornare: Journal of Sustainable and Research*, 3(1), 40-45.
- Sumarsono, dkk. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

- Susilo, A., & Wulansari, R. (2021). Perjanjian Linggarjati (diplomasi dan perjuangan bangsa Indonesia tahun 1946-1947). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 10(1), 30-42.
- Syaputra, M. A. D., Sariyatun, S., & Ardianto, D. T. (2020). Pemanfaatan situs purbakala candi muaro jambi sebagai objek pembelajaran sejarah lokal di era digital. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, 3(1)
- Tabi'in, A. (2017). Menumbuhkan sikap peduli pada anak melalui interaksi kegiatan sosial. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 1(1).
- Tindangen, M., Engka, D. S., & Wauran, P. C. (2020). Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03).
- Ubacillah dan Rozak, A. (2013). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Kencana.
- Ulfah, N. (2018). Pengembangan Kompetensi Profesional Calon Guru PKn MI: Pemahaman tentang Paradigma Baru PKn. *Ibriez : Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains*.
- Umita, I. N., Astuti, F. W., & Dio, A. C. (2023). *Demokrasi*. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(5).
- UU RI No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi.
- Wahyuni, B. (2022). SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM MODEREN PADA MASYARAKAT MELAYU JAMBI ABAD 20. *Jurnal Siginjai*, 2(1), 54-66.
- Widiyanti, L. R. (2016). Nilai Religiusitas Dalam Serat Wulang Dalem Karya Pakubuwana II. *ADITYA-Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa*, 9(1), 95-108.
- Winaputra, H.U.S. dkk. (2015). *Materi dan Pembelajaran PKn SD*. Jakarta: Universitas Terbuka.

GLOSARIUM

Abolisi	Penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan
Amandemen	Perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu
Citra	Kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan pengertiannya tentang fakta-fakta dan kenyataan
Diskriminasi	Sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu
Eksekutif	Kekuasaan menjalankan undang-undang
Eksplisit	Gamblang, tegas, teras terang, tidak berbelit-belit
Etimologi	Cabang ilmu bahasa yang menyelidiki asal-usul kata serta perubahan dalam bentuk dan makna
Falsafah	Pandangan hidup
Grasi	Pengampunan yang diberikan oleh presiden kepada seorang terpidana
Implikasi	Termasuk atau tersimpul
Integrasi	Penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional
Karakteristik	Ciri khas seseorang dalam meyakini, bertindak ataupun merasakan.
Konstitusi	Keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara
Masyarakat madani	Masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Norma	Ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya.
Normatif	Berpegang teguh pada norma
Rasional	Pikiran dan pertimbangan yang logis, menurut pikiran yang sehat, atau cocok dengan akal sehat.
Reformasi	Perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara.
Rehabilitasi	Salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan.
Supremasi	Kekuasaan tertinggi
Teritorial	Bagian wilayah suatu negara
Universal	Umum atau berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia.

INDEKS

Abolisi	145	Implikasi	18, 22
Amandemen	55, 56, 64, 65, 126, 127, 130, 134, 135, 136, 137. 140, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 153	Integrasi	88, 91
Citra	65, 108, 155, 159	Karakteristik	103, 155
Diskriminasi	12, 22, 25, 48	Konstitusi	144, 148
Eksekutif	43, 142, 144, 159	Masyarakat madani	1
Eksplisit	95. 126	Norma	148, 152
Etimologi	2, 117	Normatif	129. 143
Falsafah	119, 121	Rasional	17, 95
Grasi	91, 145	Reformasi	124, 152
		Rehabilitasi	145
		Supremasi	142,144
		Teritorial	17, 41
		Universal	45, 57

PROFIL PENULIS

Atri Waldi, M.Pd.



Atri Waldi merupakan dosen di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia. Merupakan Alumni S1 dari Jurusan Ilmu Sosial Politik Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang dan melanjutkan S2 Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Padang.

Dra. Reinita, M.Pd.



Reinita adalah seorang dosen di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia. Beliau menyelesaikan gelar sarjana di IKIP Padang pada tahun 1987. Setelah itu, beliau melanjutkan studinya di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan meraih gelar magister pada tahun 2011.



Yesi Anita Merupakan lulusan S1 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang (FIS UNP) tahun 2012, lulus S2 di Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang dengan Konsentrasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada tahun 2015. Dari tahun 2017 hingga saat ini adalah dosen tetap pada Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang (FIP UNP)

Katherine Putri Rivelia, S.Pd.



Katherine Putri Rivelia lahir di Padang pada 15 April 2001. Merupakan seorang lulusan Sarjana Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang pada tahun 2023.

Aisyah Anggraeni, S.Pd.



Aisyah Anggraeni, lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 2000. Penulis menempuh studi pada S1- Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Padang dan lulus pada tahun 2023. Pada saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan jenjang S2- Pendidikan Dasar, Universitas Negeri Padang..

KONSEP DASAR PKN SD adalah sebuah buku yang mengungkapkan inti dari Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di Sekolah Dasar dengan cara yang jelas dan komprehensif. Buku ini ditujukan untuk pembaca yang ingin memahami dasar-dasar PKN di Sekolah Dasar dan mengembangkan pemahaman mereka tentang peran warga negara dalam masyarakat.

Buku ini mengulas berbagai konsep utama dalam PKN SD, termasuk demokrasi, hak asasi manusia, partisipasi politik, serta tanggung jawab sosial dan moral. Penulis menguraikan konsep-konsep ini dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga pembaca dari berbagai latar belakang pendidikan dapat mengaksesnya tanpa kesulitan.

Selain itu, buku ini juga menggambarkan sejarah dan perkembangan PKN di berbagai negara, serta bagaimana PKN berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Pembaca akan diberikan wawasan mendalam tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam menghasilkan warga negara yang sadar, berpartisipasi, dan bertanggung jawab.

KONSEP DASAR PKN SD adalah panduan yang sangat berguna bagi mahasiswa, pendidik, dan siapa pun yang tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai makna dan relevansi Pendidikan Kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berdampingan. Buku ini akan membantu pembaca memahami bahwa menjadi warga negara yang baik adalah tugas yang penting, dan pengetahuan tentang konsep dasar PKN adalah langkah awal yang krusial dalam perjalanan tersebut.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896 5427 3996

ISBN 978-625-143-134-1



9 786231 471741